



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.347, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Rencana Strategis.
Tahun 2010-2014. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.15/Menhut-II/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P. 51/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 telah ditetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012, terdapat penambahan unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan beberapa perubahan tugas dan fungsi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan, serta pada Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, II, III, dan IV;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.

51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 720);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 51/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2010- 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 720) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Bab III bagian B nomor 2 huruf f, dan huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan
 2. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
 - f. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Tujuan
Peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya.

Outcome/hasil
Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan

lainnya.

Indikator Kinerja Utama

1. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri.
3. Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang.
4. Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang.
5. Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan
Kegiatan ini memiliki *output* meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku utama dan pelaku usaha serta peran penyuluh dalam pembangunan kehutanan. Indikator kinerja kegiatan yang diharapkan adalah :
 - a. Terbentuknya 500 Kelompok Usaha Produktif Kehutanan.
 - b. Tercukupinya Sarana Prasarana dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan Sebanyak 60 Unit Percontohan Pemberdayaan Masyarakat dan 1.300 Unit Kendaraan Operasional Penyuluh Kehutanan.
 - c. Tercukupinya Tenaga Penyuluh Kehutanan dalam rangka mendukung Pengelolaan Hutan melalui pendayagunaan 3.000 Orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan/atau Penyuluh Kehutanan Swasta.
- 2) Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan
Kegiatan ini memiliki *output* terselenggaranya pengembangan SDM Kehutanan. Indikator kegiatan yang diharapkan adalah :
 - a. Pemetaan dan Pengembangan Aparatur Kehutanan (Kemenhut dan Daerah) selesai di 33 Provinsi.
 - b. Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan SDM Non Aparatur selesai di 33 provinsi.
 - c. Sertifikasi Penyuluh Kehutanan sebanyak 1500 orang.
- 3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya
Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Kemenhut serta SDM Kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat). Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah:

- a. Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 15.000 orang peserta.
- b. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1.440 siswa.
- c. Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 325 orang lulusan.
- d. Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sejumlah 5 unit.

4) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Kegiatan ini memiliki *output* terselenggaranya tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja yang hendak dicapai adalah :

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 17 satker.
 - b. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 7 satker.
 - c. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat.
 - d. Terbentuknya kelembagaan penyuluhan di 6 provinsi dan 100 kabupaten/kota.
- h. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan

Tujuan

Terwujudnya tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien.

Outcome/hasil

Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien, serta

mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola.

Indikator kinerja utama

1. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 1 judul per tahun.
2. Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80%.
3. Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir tahun 2014.
4. Terelesainya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi.
5. Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014.
6. Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%.
7. Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun.
8. Standar produk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 35 judul.
9. Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga.
10. Tersusunnya perencanaan kehutanan 4 regional.
11. Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman Rakyat (HTR) dan hutan rakyat seluas 400.000 ha.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan, dengan *output*/keluaran berupa terselenggaranya koordinasi perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan secara baik dan mantap. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari:
 - a. Penyerapan anggaran meningkat minimal menjadi 90% diakhir tahun 2014.
 - b. Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir tahun 2014.
 - c. Model implementasi kebijakan kehutanan di 3 kabupaten.
- 2) Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian, dengan *ouput*/keluaran berupa terselenggaranya tertib dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut

- adalah:
- a. Pelayanan administrasi kepegawaian minimal 95% akurat dan tepat waktu.
 - b. Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%.
 - c. Data kepegawaian dalam SIMPEG minimal 98% sesuai dengan data yang dimiliki individu PNS.
- 3) Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan. *Output*/keluaran kegiatan dimaksud adalah mantapnya tata hukum dan organisasi di lingkup Kementerian Kehutanan, dengan indikator kinerja utama berupa:
- a. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 75% di akhir tahun 2014.
 - b. Pencapaian penelaahan hukum peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 80% di akhir tahun 2014.
 - c. Penanganan perkara di bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014.
 - d. Pencapaian pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup Kemenhut minimal sebesar 70% di akhir tahun 2014.
- 4) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan, dengan *output*/keluaran berupa tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
- a. Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan KUKDAS, KUHR dan KUPA serta PSDH DR sebesar 80%
 - b. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun)
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 13,75 Triliun.
- 5) Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan. *Output*/keluaran pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tertibnya pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara (BMN) Kementerian Kehutanan, dengan indikator kinerja utama berupa :
- a. SIMAK BMN Kementerian Kehutanan akuntabel dan

- tepat waktu sebanyak 225 satuan kerja per tahun.
- b. Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang.
 - c. Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Mangala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramatjati, dan Rumpin).
 - d. terselesaikannya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi.
- 6) Pembinaan Standardisasi, Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim Kehutanan. *Output*/keluaran kegiatan tersebut adalah berkembangnya standardisasi produk, proses, dan kompetensi teknis di bidang kehutanan, peningkatan pengelolaan lingkungan dan penanganan perubahan iklim kehutanan. Indikator kinerja utama pencapaian *output* tersebut adalah :
- a. Standar produk dan jasa kehutanan, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 35 judul.
 - b. Sertifikasi pengelolaan hutan milik rakyat 15 unit.
 - c. Rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim kehutanan sebanyak 5 paket.
- 7) Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri. *Output*/keluaran kegiatan dimaksud adalah meningkatnya peran dan posisi Indonesia di bidang kehutanan, sedangkan kinerja utama pencapaian *ouput* tersebut berupa:
- a. Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun.
 - b. Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) sebanyak 5 paket.
 - c. Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga.
 - d. Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun.
- 8) Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan. *Output*/keluaran kegiatan tersebut adalah memperkuat pemahaman dan

- komitmen masyarakat terhadap pembangunan kehutanan, dengan indikator kinerja utama berupa:
- a. Meningkatnya citra positif Kementerian Kehutanan sebesar 10% per tahun.
 - b. Meningkatnya berita kegiatan pimpinan Kementerian Kehutanan sebesar 10% per tahun.
 - c. Meningkatnya publikasi kebijakan program pembangunan kehutanan sebesar 10% per tahun.
 - d. Hubungan dengan lembaga tinggi negara, pemerintah dan lembaga non pemerintah meningkat sebesar 10% per tahun.
- 9) Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan. *Output*/keluaran kegiatan tersebut adalah fasilitasi dan ketersediaan pembiayaan pembangunan kehutanan, dengan indikator kinerja utama berupa:
- a. Kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat) seluas 400.000 ha.
 - b. Pemahaman terhadap skim pinjaman pembangunan hutan tanaman di 60 kabupaten tahun 2014.
 - c. Peningkatan penguatan kelembagaan debitur di 15 kabupaten tahun 2014.
- 10) Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I. *Output*/keluaran kegiatan dimaksud adalah terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional I, dengan Indikator Kinerja Utama Kegiatan Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I adalah:
- a. Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Regional I berjalan minimal 90%.
 - b. Tersusunnya Perencanaan Kehutanan di Regional I, 2 dokumen.
 - c. RKTP di 10 Provinsi Selaras dengan RKTN di tingkat Regional.
 - d. Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPH disahkan sebanyak 40 KPH.
 - e. Organisasi KPH tertata di 40 KPH.
 - f. Masalah Tenurial diselesaikan sebanyak 2 kasus.
- 11) Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II. *Output*/keluaran kegiatan dimaksud adalah terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional II, dengan Indikator Kinerja Utama Kegiatan Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II adalah:

- a. Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Regional II berjalan minimal 90%.
 - b. Tersusunnya Perencanaan Kehutanan di Regional II, 2 dokumen.
 - c. RKTP di 9 provinsi selaras dengan RKTN di tingkat Regional.
 - d. Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPH disahkan sebanyak 14 KPH.
 - e. Organisasi KPH tertata di 14 KPH.
 - f. Masalah Tenurial diselesaikan sebanyak 2 kasus.
- 12) Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III. Output/keluaran kegiatan dimaksud adalah terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional II, dengan Indikator Kinerja Utama Kegiatan Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II adalah:
- a. Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Regional III berjalan minimal 90%.
 - b. Tersusunnya Perencanaan Kehutanan di Regional III, 2 dokumen.
 - c. RKTP di 4 provinsi selaras dengan RKTN di tingkat Regional.
 - d. Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPH disahkan sebanyak 23 KPH.
 - e. Organisasi KPH tertata di 23 KPH.
 - f. Masalah Tenurial diselesaikan sebanyak 2 kasus.
- 13) Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV. Output/keluaran kegiatan dimaksud adalah terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional II, dengan Indikator Kinerja Utama Kegiatan Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II adalah:
- a. Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Regional IV berjalan minimal 90%.
 - b. Tersusunnya Perencanaan Kehutanan di Regional IV, 2 dokumen.
 - c. RKTP di 10 provinsi selaras dengan RKTN di tingkat Regional.
 - d. Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPH disahkan sebanyak 43 KPH.
 - e. Organisasi KPH tertata di 43 KPH.
 - f. Masalah Tenurial diselesaikan sebanyak 2 kasus.
- 14) Penataan Sarana dan Peralatan Kehutanan. Output/keluaran kegiatan tersebut adalah

terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan guna mendukung pengelolaan hutan secara lestari, dengan Indikator Kinerja Utama Kegiatan Penataan Sarana dan Peralatan Kehutanan adalah:

- Pemetaan Sarana dan Peralatan Kehutanan selesai 25%.
- Optimalisasi Pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan sebesar 50%.

2. Ketentuan Lampiran 1f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

10

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Utama atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Peningkatan dan Pengembangan SDM Kehutanan	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan pelaku aparat. Pemerintah dan SDM Kehutanan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat. Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri. Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang. Pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang. Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang. 									297,87	248,91	248,91	248,91

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN PASSELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)						
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	Pencapaian Pengembangan SDM kekhutanan	Terselektifnya pengembangan SDM kekhutanan	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan dan Pengembangan Aparatur kekhutanan (Kemenhut dan Daerah) selesai di 33 Provinsi. Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan SDM Non Aparatur selesai di 33 provinsi. Sertifikasi Penyuluh kekhutanan sebanyak 1500 orang. 	200 Orang	500 Orang	1000 Orang	17 Provinsi	33 Provinsi	2000 Orang	13.57	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68
b	Peningkatan pelayanan penyuluhan kekhutanan	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku usaha serta peran penyuluh dalam pembangunan kekhutanan	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya 500 Kelompok Usaha Produktif kekhutanan. Tercukupinya Sarana Prasarana dan Alat Bantu Penyuluhan kekhutanan Sebanyak 60 Unit Percobaan Pemberdayaan Masyarakat dan 1.300 Unit Kendaraan Operasional Penyuluh kekhutanan. Tercukupinya Tenaga Penyuluh kekhutanan dalam rangka 	100 Kelompok	200 Kelompok	300 Kelompok	400 kelompok	500 kelompok	500 kelompok	71,85	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42

No.	PROGRAM/KECIA TAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKSI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)									
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4																
			<p>mendukung Pengelolaan Hutan melalui pendayagunaan 3.000 Orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan/atau Penyuluh Kehutanan Swasta.</p>																
c	<p>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya</p>	<p>Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur Kementerian Kehutanan serta SDM Kehutanan lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 15.000 orang peserta. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1.440 siswa. Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 325 orang lulusan. Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sejumlah 5 unit. 	3000 orang	6000 orang	9000 orang	12000 orang	15000 orang	143,70	143,57	146,22	149,02	151,05						

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKSI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)						
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
				1	d	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis administrasi Badan Penyeluluh dan Pengembangan SDM Kehutanan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penyeluluh dan Pengembangan SDM secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyeluluh dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di lingkungan Badan Penyeluluh dan Pengembangan SDM Kehutanan Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan Penyeluluh dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Pemerintah "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 17 satker. Terdapat 50 kerjasama kerjasama peningkatan kemahiran melalui petan serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam 	17 satker	17 satker	17 satker	17 satker	17 satker	17 satker		62,50	63,65	64,81	65,76		

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN (Hasil Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY (Miliar Rupiah)							
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 pemberdayaan masyarakat. Terbentuknya • pemerintahan di 6 provinsi dan 100 kabupaten/kota.	0 provinsi 0 kab/kota	2 provinsi 0 kab/kota	3 provinsi 0 kab/kota	4 provinsi 1 kab/kota	6 provinsi 100 kab/kota								

3. Ketentuan Lampiran 1h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sekretariat Jenderal ...

Sekretariat Jenderal

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN <small>(Hasil Outcomes atau output yang diharapkan)</small>	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKSI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS <small>(Miliar Rupiah)</small>								
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4															
7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan	Meningkatnya tata kelola administrasi pencapaian Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola.	<ul style="list-style-type: none"> • Opini laporan keuangan keutuenuan Kehutanan tahunan "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 1 judul per tahun. • Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80%. • Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir tahun 2014. • Terselenggarakan status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi. • Penanganan perkara, pemulihan hak negara bidang kehutanan minimal menyang sebesar 80% di akhir tahun 2014. • Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai 	408,64										447,70	447,70	447,70	447,70	

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF							ALOKSI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			<ul style="list-style-type: none"> minimal terenuhi 95%. Meningkatnya citra positif kemenuit sebesar 10% per tahun. Standar produk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim: 35 judul. Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga. Tersusunnya perencanaan kehutanan 4 regional. Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman Rakyat (HTR) dan hutan rakyat seluas 400.000 ha. 													
a	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan	terselenggaranya koordinasi perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan secara baik dan mantap	<ul style="list-style-type: none"> Penyerapan anggaran meningkat minimal menjadi 90% diakhir tahun 2014. Pencapaian 	80 %	82 %	85 %	87 %	90 %	24,23	84,39	85,05	87,50	88,79			

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKSI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			sasaran strategis minimal 95% di akhir tahun 2014. • Model implementasi kebijakan kebutuhan di 3 kabupaten.	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten							
b	Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian,	Terselenggaranya tertib dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Kehutanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan administrasi kepegawaian minimal 95% akurat dan tepat waktu. • Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%. • Data kepegawaian dalam SIMPEG minimal 98% sesuai dengan data yang dimiliki individu PNS. 	85 %	87 %	90 %	92 %	95 %	10,15	18,90	19,25	19,62	19,88		
c	Penyelenggaraan dan Penubinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan	Mempunya tata hukum dan organisasi di lingkup Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rancangan peraturan-perundang-undangan lingkup Kementerian minimal sebesar 75% di akhir tahun 2014. • Pencapaian pelaksanaan hukum peraturan perundang-undangan lingkup 	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	9,80	11,80	12,02	12,25	12,41		
			<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian pelaksanaan hukum peraturan perundang-undangan lingkup 	16 %	32 %	48 %	64 %	80 %							

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKSI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<p>Kemenuh minimal sebesar 80% di akhir tahun 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perkarat, pemuliharaan hak negara bidang kehutanan minimal menaang sebesar 80% di akhir tahun 2014. • Pencapaian pembinaan kelenbagaan dan ketatalaksanaan lingkup Kemenuh minimal sebesar 70% di akhir tahun 2014. 	16 %	32 %	48 %	64 %	80 %							
d	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan,	berupa terbunya pelaksanaan administrasi keuangan Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembalian pinjaman/putang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan KUKDAS, KUHR dan KUPA serta PSDH LDR sebesar 80% • Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan " wajar tanpa pengecualian" mulai laporan tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun) 	15 %	30 %	45 %	60 %	80 %	51,94	59,35	60,45	61,60	62,44		

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 13,75 Triliun. 	<ul style="list-style-type: none"> • SIMAK BMN Kementerian Kehutanan akuntabel dan tepat waktu sebanyak 225 satuan kerja per tahun • Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang. • Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Mangala Wanabakti, Kanci, Cimanigis, Kramatjati, dan Kumpun). • Terselenggaranya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi. 	Rp. 2,75 Triliun	Rp. 5,5 Triliun	Rp. 8,25 Triliun	Rp. 11 Triliun	Rp. 13,75 Triliun							
e	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlempangan Kementerian Kehutanan	Terbiayanya pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara (BMN) Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • SIMAK BMN Kementerian Kehutanan akuntabel dan tepat waktu sebanyak 225 satuan kerja per tahun • Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang. • Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Mangala Wanabakti, Kanci, Cimanigis, Kramatjati, dan Kumpun). • Terselenggaranya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi. 	225 Satker	225 Satker	225 Satker	225 Satker	225 Satker	157,98	164,66	167,70	170,91	173,20		

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcome atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKSI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Pembinaan Standarisasi, Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim Kehutanan	Berkembangnya standarisasi produk, proses, dan kebutuhan, serta kompetensi teknis di bidang pengelolaan dan penanganan perubahan iklim kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Standard produk dan jasa kehutanan, serta penanganan pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 35 judul. Sertifikasi pengelolaan hutan milik rakyat 15 unit. Rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim kehutanan sebanyak 5 paket. 	6 Produk	12 Produk	19 Produk	26 Produk	35 Produk	7,54	11,09	11,91	12,13	12,30		
g	Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri.	Meningkatnya peran dan posisi Indonesia di bidang kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun. Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) sebanyak 5 paket. Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak 	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	16,43	22,26	22,67	23,10	23,42		

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)													
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	sebanyak 3 lembaga. • Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun.	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
h	Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan.	Memperkuat pemahaman dan komitmen masyarakat terhadap pembangunan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya citra positif kementhut sebesar 10% per tahun. Meningkatnya berita kegiatan peminatan Kementhut sebesar 10% per tahun. Meningkatnya publikasi kebijakan program pembangunan kehutanan sebesar 10% per tahun. Hubungan dengan lembaga tinggi negara pemerintah dan lembaga non pemerintah meningkat sebesar 10% per tahun 	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	10 %	23,28	23,71	24,16	24,49									

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKSI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengelolaan Keuangan, Penyuluran dan Pengembangan Desa Bergulir, Pembinaan dan Pembangunan Kehutanan.	Fasilitas dan ketersediaan pembiayaan pembangunan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Kredit pembangunan hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat) seluas 400.000 ha. Pemahaman terhadap skem pinjaman pembangunan hutan tanaman di 60 kabupaten tahun 2014. Peningkatan penguatan kelembagaan debitur di 15 kabupaten tahun 2014. 	80.000 ha	160.000 ha	240.000 ha	320.000 ha	400.000 ha	9,85	10,80	11,00	11,21	11,36		
j	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I	Terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional I	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Regional I berjalan minimal 90%. Tersusunnya Perencanaan Kehutanan di Regional I, 2 dokumen RKTP di 10 Provinsi Selaras dengan RKTN di tingkat Regional Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPH 	18 %	36 %	54 %	72 %	90 %				7,00	7,67	8,32	8,61

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)									
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	disahkan sebanyak 40 KPH. • Organisasi KPH terlata di 40 KPH • Masalah Tenurial diselesaikan sebanyak 2 kasus.	18 %	36 %	54 %	72 %	90 %	18 %	36 %	54 %	72 %	90 %	7,60	8,31	8,32	8,61	
k	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II	Terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional II	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Regional II berjalan minimal 90%. • Tersusunnya Perencanaan Kehutanan di Regional II, 2 dokumen. • RKTP di 9 provinsi, selaras dengan RKTN di tingkat Regional. Rencana Jangka Panjang • Pengelolaan KPH disahkan sebanyak 14 KPH. • Organisasi KPH terlata di 14 KPH. • Masalah Tenurial diselesaikan sebanyak 2 kasus. 	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9 Provinsi	14 KPH	7 KPH	7 KPH	1 Kasus	2 Kasus
1	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III	Terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional III	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Regional III berjalan minimal 90%. 	18 %	36 %	54 %	72 %	90 %	18 %	36 %	54 %	72 %	90 %	4,75	5,21	5,52	5,94		

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil/Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Perencanaan Kehutanan di Regional III, 2 dokumen. • RKT di 4 provinsi selaras dengan RKTN di tingkat Regional. • Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPH disahkan sebanyak 23 KPH. • Organisasi KPH tertata di 23 KPH. • Masalah Tenurial diselesaikan sebanyak 2 kasus. 	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen							
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Perencanaan Kehutanan di Regional IV, 2 dokumen. • RKT di 10 provinsi selaras dengan RKTN di tingkat Regional. • Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPH disahkan sebanyak 43 KPH. • Organisasi KPH 	18 %	36 %	54 %	72 %	90 %				10,00	10,58	11,03	11,62
m	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV	Terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional IV	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Regional IV berjalan minimal 90%. • Tersusunnya Perencanaan Kehutanan di Regional IV, 2 dokumen. • RKT di 10 provinsi selaras dengan RKTN di tingkat Regional. • Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPH disahkan sebanyak 43 KPH. • Organisasi KPH 	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen							

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes atau output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKSI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)							
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			tertata di 43 KPH • Masalah Tenurial diselesaikan sebanyak 2 kasus. • Pemetaan Sarana dan Peralatan kehutanan selesai 25%. • Optimalisasi Pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan sebesar 50 %				1 Kasus	2 kasus								
n	Penataan Sarana dan Peralatan kehutanan	Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan guna mendukung pengelolaan hutan secara lestari					10 %	25 %				6,2	6,5	6,7	6,8	

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN